



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARITJE PATTIWAELLAPIA**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **246901**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1345 m2/345 m2 di KAB / KOTA KOTA AMBON , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA AMBON , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 395.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, MITSHUBISI MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOBIL, MITSUBISI MESIN COMMON RAIL SYSTEM 4D37, 4 STROKE MITSUBISI FUSO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 107.000.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 237.698.190**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 2.139.698.190**III. HUTANG** Rp. 475.494.397**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.664.203.793

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.